

BAB III

KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK (AIIB)

Investasi infrastruktur merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru di luar perdagangan, mengingat peran infrastruktur dalam perkembangan perekonomian sangatlah penting. Namun demikian, ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu masalah besar dalam proses perkembangan perekonomian di negara-negara kawasan Asia. Karakter peningkatan perekonomian yang berbeda di negara-negara Asia memperlihatkan adanya kesenjangan ekonomi yang sangat besar.

Tiongkok sebagai salah satu negara terbesar di Asia pun merupakan salah satu negara yang cukup aktif memelopori pembentukan *Multi Development Bank* (MDB). Pada bulan Juli 2014, Tiongkok membentuk MDB bersama kelompok BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Cina (Tiongkok) dan Afrika Selatan, dengan tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di negara-negara tersebut.

Selain melalui BRICS, dalam rangka mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur di negara-negara Asia, Tiongkok menginisiasi ide pendirian *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Bank infrastruktur Asia ini dicanangkan untuk bekerja sama dengan bank pembangunan bilateral yang telah ada saat ini. Dengan

demikian bank-bank tersebut dapat saling mengisi dan mendorong perkembangan ekonomi Asia.

A. Sejarah AIIB

Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB) adalah lembaga keuangan internasional yang difokuskan untuk membangun pembangunan infrastruktur di kawasan Asia-Pasifik. AIIB diusulkan oleh pemerintah Tiongkok. Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang mengumumkan inisiatif pembentukan AIIB selama kunjungan mereka ke masing-masing negara Asia Tenggara pada bulan Oktober 2013. (What is the Asian Infrastructure Investment Bank?, 2015) AIIB adalah bank multilateral baru yang dirancang untuk memberikan dukungan keuangan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas regional di Asia.

Tujuan dari AIIB adalah mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan kekayaan dan meningkatkan konektivitas infrastruktur di Asia dengan berinvestasi dalam infrastuktur dan sektor produktif lainnya, dan meningkatkan kerja sama regional dan kemitraan dalam mengatasi tantangan pembangunan dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga pembangunan multilateral dan bilateral lainnya. Dalam *Articles of Agreement* (AOA) fungsi AIIB adalah mempromosikan investasi publik dan swasta di kawasan Asia untuk pembangunan, khususnya untuk infrastruktur dan sektor produktif lainnya, mendorong investasi swasta yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di kawasan Asia, dan melengkapi investasi

swasta ketika modal swasta tidak tersedia pada syarat dan kondisi yang wajar.

(PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP, 2015)

Pada bulan Oktober 2014, perwakilan dari 22 negara menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk membangun AIIB dan Beijing terpilih menjadi tuan rumah AIIB. Jin Liqun diangkat sebagai Sekretaris Jenderal dalam *Multilateral Interim Secretariat*. Sekretariat bertugas untuk melakukan persiapan teknis untuk mendirikan AIIB dan untuk memberikan dukungan dan layanan teknis dalam *Chief Negotiators Meetings* (CNM). (What is the Asian Infrastructure Investment Bank?, 2015) Jin Liqun sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan Cina (setara dengan wakil menteri di Jepang), Wakil - Presiden dari Asian Development Bank (ADB), dan Ketua Dewan Pengawas dari Sovereign Wealth Fund, China Investment Corporation (CIC). (Sekine, 2015)

The Prospective Founding Members (PFMs) atau calon anggota pendiri membentuk CNM sebagai forum bagi PFMs untuk bernegosiasi dan menyepakati *Articles of Agreement* (AOA) dan isu-isu lain yang berkaitan dengan pendirian AIIB. CNM telah dilaksanakan sebanyak 7 kali (AIIB, 2015) dan akan terus dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu. CNM pertama diadakan pada bulan November 2014 di Kunming, Tiongkok. CNM kedua di Mumbai, India pada Januari 2015 mendiskusikan tentang rancangan AOA. Kemudian CNM ketiga di Almaty, Kazakhstan pada Maret 2015. CNM ke 4 dilaksanakan di Beijing, Tiongkok pada April 2015. Berlanjut ke CNM ke 5 di Singapura pada Mei 2015 yang membahas tentang finalisasi AOA juga membahas tentang draft lingkungan hidup dan kerangka sosial serta rancangan kerangka kebijakan pendanaan, dan

topik-topik lainnya. CNM ke 6 dilaksanakan di Tlibisi, Georgia pada Agustus 2015 dengan mengangkat Jin Liqun sebagai *President-designate*. Dan CNM ke 7 di Frankfurt, Jerman pada September 2015 dengan ditandatanganinya AOA oleh 52 negara dari 57 negara anggota. Di mana batas penandatanganan AOA hingga Desember 2015.(AIIB, 2015) Dan CNM selanjutnya akan terus dilaksanakan guna membahas isu-isu krusial berkaitan pembentukan dan pelaksanaan AIIB.

Menurut laporan dari *Asian Development Bank* (ADB) hingga tahun 2020 setiap tahunnya Asia membutuhkan dana 800 miliar dollar Amerika untuk investasi pembangunan infrastruktur. Sedangkan ADB sendiri tidak dapat meminjamkan lebih dari 10 miliar dollar Amerika. Organisasi *Bretton Woods* yang terdiri dari IMF dan Bank Dunia tidak dapat meminjamkan dana yang besar untuk kawasan Asia semata.(Laxmikanth, 2015)Oleh karena hal tersebut, Tiongkok memprakarsai pembentukan AIIB sebagai bank multilateral pembangunan yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman dana secara eksklusif kepada negara-negara Asia.

Paska menjabat sebagai Presiden Tiongkok, Xi Jinping terus melakukan upaya untuk melakukan ekspansi bagi peranan Tiongkok pada *level state-system*. Salah satu yang diinisiasi oleh Presiden Xi adalah membangun ulang kejayaan jalur sutera di era abad 21. Jalur Sutera merupakan jalan perdagangan kuno yang dirintis semenjak tahun 206 sebelum masehi, di era Dinasti Han. Di masa kegemilangannya jalur sutera membentang sejauh lebih dari 6000 Km menghubungkan Tiongkok dengan peradaban barat. Jalur Sutera berfungsi sebagai *transmission belt* penting bagi penyebaran teknologi, pengetahuan,

ideologi kala itu. Jalur Sutera juga berperan signifikan bagi akselerasi pertumbuhan peradaban yang dilintasinya baik Tiongkok, Persia, Eropa, dan Sub kontinen India. Tidak hanya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Jalur Sutera menjadi sebuah platform bagi interaksi dan munculnya *mutual understanding* bagi negara-negara yang dilewatinya. (Setiawan, 2015)

Pembentukan AIIB pun tidak lepas dari rencana besar Tiongkok dalam membangun kembali Jalur Sutera (*Silk Road*) untuk mengatasi hambatan konektifitas antarnegara. Pembangunan Jalur Sutera dianggap dapat meningkatkan jaringan perdagangan dan transportasi kawasan Asia. Tiongkok membagi Jalur Sutera ke dalam dua bagian, yaitu jalur darat (*Economic Belt*) dan jalur laut (*Maritime Road*). Pembangunan infrastruktur jalur darat mencakup jaringan jalan raya, kereta api, bandara, dan infrastruktur penting lainnya yang menghubungkan Tiongkok dan Asia Tengah, Timur Tengah dan Eropa. Sedangkan infrastruktur laur laut meliputi bangunan atau perluasan pelabuhan dan kawasan industri Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Untuk mewujudkan Jalur Sutera ini, Tiongkok bersedia menginvestasikan dananya hingga 40 miliar dolar AS. Di luar dana investasi itu, Tiongkok membentuk AIIB untuk mempercepat perwujudan proyek Jalur Sutera itu. Untuk tujuan itu, Tiongkok akan menyediakan dana awal AIIB sebesar 50 miliar dolar AS. (Wangke, 2015)

Gambar 1: Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Jalur Sutra



Sumber: The Daily Star, 8 Maret 2015

B. Anggota Pendiri AIIB

Daftar AIIB calon anggota pendiri (PFMs) mengalami perubahan besar sebelum batas waktu pendaftaran pada tanggal 31 Maret 2015. Pada tanggal 12 Maret 2015, Inggris menjadi negara G7 pertama yang mengumumkan akan menjadi anggota pendiri. Hal ini diikuti oleh Jerman, Perancis, dan Italia pada tanggal 17 Maret. Setelah itu, satu demi satu negara diterapkan untuk diterima sebagai anggota pendiri, dan setelah periode peninjauan dua minggu PFMs menjadi 57 anggota pendiri diumumkan pada tanggal 15 April. (Sekine, 2015)

Tabel 8: Anggota Pendiri AIB

No.	Region	Founding member nation (region)	Application Date	Approval Date	
1	East Asia	China	MoU signatory	24 October 2014	
2		Mongolia	MoU signatory	24 October 2014	
3		South Korea	27 March 2015	11 April 2015	
4	Southeast Asia	Singapore	MoU signatory	24 October 2014	
5		Thailand	MoU signatory	24 October 2014	
6		Malaysia	MoU signatory	24 October 2014	
7		Brunei	MoU signatory	24 October 2014	
8		Philippines	MoU signatory	24 October 2014	
9		Cambodia	MoU signatory	24 October 2014	
10		Laos	MoU signatory	24 October 2014	
11		Myanmar	MoU signatory	24 October 2014	
12		Vietnam	MoU signatory	24 October 2014	
13		Indonesia	-	25 November 2014	
14	Oceania	New Zealand	-	01 January 2015	
15		Australia	29 March 2015	13 April 2015	
16	South Asia	India	MoU signatory	24 October 2014	
17		Nepal	MoU signatory	24 October 2014	
18		Bangladesh	MoU signatory	24 October 2014	
19		Sri Lanka	MoU signatory	24 October 2014	
20		Pakistan	MoU signatory	24 October 2014	
21		Maldives	-	31 December 2014	
22	Former Soviet Union, Central Asia	Kazakhstan	MoU signatory	24 October 2014	
23		Uzbekistan	MoU signatory	24 October 2014	
24		Tajikistan	-	13 January 2015	
25		Georgia	28 March 2015	12 April 2015	
26		Russia	30 March 2015	14 April 2015	
27		Kyrgyzstan	31 March 2015	09 April 2015	
28	Azerbaijan	-	15 April 2015		
29	Middle East	Oman	MoU signatory	24 October 2014	
30		Qatar	MoU signatory	24 October 2014	
31		Kuwait	MoU signatory	24 October 2014	
32		Saudi Arabia	-	13 January 2015	
33		Jordan	-	07 February 2015	
34		Turkey	26 March 2015	10 April 2015	
35		Israel	31 March 2015	(not announced by	15 April 2015

			MoF)	
36		Iran	-	03 April 2015
37		UAE	-	03 April 2015
38	Europe	UK	12 March 2015	28 March 2015
39		France	17 March 2015 (announced by MoF)	02 April 2015
40		Italy	17 March 2015 (announced by MoF)	02 April 2015
41		Germany	17 March 2015 (announced by MoF)	01 April 2015
42		Luxembourg	18 March 2015	27 March 2015
43		Swiss	20 March 2015	28 March 2015
44		Austria	27 March 2015	11 April 2015
45		Netherlands	28 March 2015	12 April 2015
46		Denmark	28 March 2015	12 April 2015
47		Finland	30 March 2015	12 April 2015
48		Sweden	31 March 2015	15 April 2015
49		Iceland	31 March 2015	15 April 2015
50		Portugal	31 March 2015	15 April 2015
51		Norway	31 March 2015 (not announced by MoF)	14 April 2015
52		Malta	-	09 April 2015
53		Spain	-	11 April 2015
54		Poland	-	15 April 2015
55	Latin America	Brazil	28 March 2015	12 April 2015
56	Africa	Egypt	30 March 2015	14 April 2015
57		South Africa	-	15 April 2015

Sumber: Nomura Institute of Capital Markets Research, based on data from China's Ministry of Finance

Besarnya minat negara-negara Asia dan non-Asia atas terbentuknya AIIB ternyata bertolak belakang dengan 2 negara besar yang memiliki pengaruh luas dalam perekonomian dan lembaga keuangan global, yaitu Amerika dan Jepang. Sikap Amerika terbilang negatif atas pembentukan AIIB sebagai bank multilateral baru. Pejabat Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya atas standar yang akan nantinya dijalankan oleh AIIB. Apakah akan memiliki standar pengawasan dan pelaksanaan yang tinggi seperti bank multilateral lainnya dan terhadap perlindungan lingkungan dan sosial. Amerika Serikat pun telah

menggunakan tekanan diplomatik untuk mencoba dan mencegah sekutu kuncinya seperti Australia untuk tidak bergabung dengan AIIB, dan menyatakan kekecewaannya ketika Inggris ikut bergabung.(Watt, Lewis, & Branigan, 2015)

Jepang menyikapi pembentukan AIIB dengan sikap yang serupa dengan Amerika. Masato Kitera, utusan Tokyo di Beijing menyatakan sebelumnya bahwa Jepang mungkin bergabung dengan AIIB.(Frence-Presse, 2015)Menteri Keuangan Jepang Taro Aso sebelumnya menunjukkan minat bergabung dengan AIIB, tetapi kemudian beralih sikap. Yoshihide Suga, Sekretaris Kabinet Jepang mengatakan kepada publik bahwa Jepang masih mencari penjelasan lengkap dari Tiongkok tentang AIIB karena ia menyatakan, "Pada hari ini, Jepang tidak akan bergabung AIIB dan belum menerima penjelasan dari Tiongkok berkaitan tentang AIIB" dan "Jepang meragukan tentang apakah (AIIB) akan diatur dengan benar atau akan mempengaruhi kreditur lainnya". Dia juga menyatakan bahwa Jepang tidak lagi mempertimbangkan apakah akan atau tidak untuk bergabung. Juru bicara pemerintah Jepang juga mengumumkan bahwa Jepang tidak akan bergabung dengan AIIB. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe juga menambahkan bahwa Jepang tidak perlu bergabung dengan AIIB.(Kurtenbach, 2015)

C. Struktur Kepemilikan Saham AIIB

Modal dasar AIIB sebesar 100 miliar dolar Amerika, yang dibagi menjadi 1 juta saham dengan nilai nominal sebesar 100.000 dollar amerika. Sebagai bank

regional, mayoritas modal saham sebesar 75 % dipegang oleh anggota regional Asia. Pada poin A dalam AOA dijelaskan sebesar 1,6 miliar dollar amerika adalah saham kosong yang ditujukan untuk negara anggota regional dan sebesar 243.000.000 dollar amerika untuk anggota non-regional dalam mengantisipasi bergabungnya anggota tambahan pada setiap wilayah.(PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP, 2015)

Parameter dasar untuk alokasi modal didasarkan pada ukuran ekonomi global anggota (dihitung menggunakan nominal PDB (60%) dan PDB PPP (40%)). Negara regional Asia atau pun non-regional dengan mempertimbangkan jumlah saham yang dimiliki negara anggota tersebut.

Selain modal yang berasal dari anggota, AIIB akan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi di pasar keuangan serta melalui transaksi pasar antar bank dan instrument keuangan lainnya. AIIB pun dapat mengumpulkan dana melalui pinjaman atau cara lain, di negara-negara anggota atau di negara lain, sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan.

Instrumen finansial AIIB difokuskan pada pembiayaan proyek-proyek atau program investasi tertentu, yaitu investasi ekuitas dan jaminan. Dengan berpartisipasi dalam pinjaman langsung, investasi modal di lembaga atau perusahaan, dan jaminan pinjaman untuk pembangunan ekonomi.

AIIB memiliki tiga kategori hak voting (hak suara) yaitu *basic votes*, *share votes* and *Founding Member votes*. *Basic votes* adalah sama untuk semua anggota dan merupakan 18% dari total suara, sedangkan *share votes* adalah sama dengan

jumlah saham yang dimiliki anggota. Setiap Anggota Pendiri selanjutnya mendapat 600suara.

Secara operasional AIIB akan menawarkan pinjaman jangka panjang, membuat investasi ekuitas atau menyediakan jaminan menyeluruh atau sebagian yang terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara anggota dan membantu memperdalam konektivitas dan integrasi regional. Oleh karena itu, AIIB akan menawarkan pinjaman jangka panjang (mirip dengan pinjaman OCR ADB dan pinjaman IBRD Bank Dunia) dengan tarif terjangkau. AIIB juga dapat memberikan jaminan untuk pinjaman dalam infrastruktur atau melakukan investasi ekuitas langsung di sektor infrastruktur. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk infrastruktur yang sangat besar dana di wilayah Asia, AIIB juga akan mengeksplorasi cara untuk menyediakan dana pendamping dengan MDBs yang ada dan memobilisasi dana swasta. Apabila kondisi memungkinkan, AIIB mungkin akan menyiapkan dana perwalian (*trust funds*) atau fasilitas keuangan lainnya untuk menawarkan hibah atau pinjaman lunak untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kawasan Asia. (Kementrian Keuangan, 2014)

D. Struktur Tata Kelola AIIB

Struktur tata kelola AIIB terdiri dari Dewan Gubernur sebagai pengambil keputusan tertinggi, Dewan Direksi sebagai tingkat menengah, dan Presiden serta

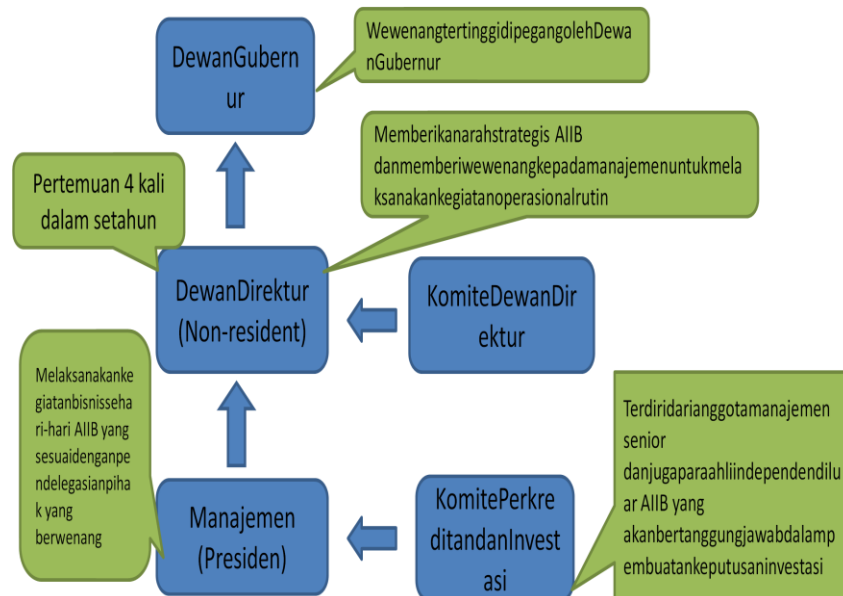
tim manajemen pada bagian bawah struktur piramida pengambilan keputusan.

Dengan pembagian antara lain:(Laxmikanth, 2015)

Tabel 9: Struktur Tata Kelola AIIB(Laxmikanth, 2015)

Board of Governors	<ul style="list-style-type: none"> • Highest Decision Making body. • Voting power according to shareholding. • Shareholding according to GDP.
Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> • Board of Governors, will elect these directors. • They'll decide budget and submit reports to Board of Governors.
President	<ul style="list-style-type: none"> • He is the president of Board of directors. • Person with long experience and ethical integrity in banking /economics / finance. • He'll be selected on “merit”. • Responsible for Day to day administration, hire and fire staff. • He can appoint vice President to reduce work load.

Gambar 2: Struktur Organisasi AIIB



Sumber: Riset dan Kajian Asian Infrastructure Investment Bank (Badan Kebijakan Fiskal – Pusat Kebijakan Regional Bilateral)

Komposisi Dewan Gubernur terbentuk dari kesepakatan tiap anggota AIIB yang menunjuk Gubernur sebagai perwakilan di Dewan Gubernur, semua kekuasaan AIIB nantinya berada dalam Dewan Gubernur, yang kemudian keputusan Dewan Gubernur didelegasikan kepada Dewan Direksi.

AIIB dirancang akan memiliki 12 Dewan Direksi, 9 dipilih oleh negara regional, dan 3 dipilih dari negara non-regional. Dewan Direksi bertanggung jawab dalam operasi umum AIIB yang melaksanakan semua keputusan yang didelegasikan oleh Dewan Gubernur.

Presiden AIIB sendiri dipilih oleh Dewan Gubernur melalui proses yang transparan mempertimbangkan kemampuan para calon nama yang diajukan oleh Dewan Gubernur, Presiden menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 2 periode kepemimpinan. Peran Presiden adalah sebagai pelaku bisnis yang dilaksanakan oleh bank di bawah arahan Dewan Direksi. Presiden dapat mengajukan wakil presiden yang nantinya akan di setuju oleh Dewan Direksi.

Tim manajemen sebagai direksi pengawasan bertugas dalam mengawasi pengelolaan dan pengoperasian bank secara teratur dan membentuk mekanisme pengawasan untuk menjalankan tujuan prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan, independensi, dan akuntabilitas. Dan mengawasi berbagai bidang seperti audit, evaluasi, penipuan dan korupsi, pengaduan proyek dan keluhan staf.

E. Posisi Indonesia dalam AIIB

Kemampuan keuangan pemerintahan suatu negarasangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan infrastruktur dan pembangunan infrastruktur negara. Kondisi jaringan infrastruktur yang rendah akan meningkatkan biaya pengguna (*user costs*) yang sangat besar, menghambat mobilitas ekonomi, meningkatkan harga barang serta mempersulit upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi hal tersebut, hal yang mesti ditempuh pemerintah adalah dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Dalam merealisasikan hal tersebut, pemerintah sering kali menghadapi beberapa kendala, diantaranya adalah: Pertama, investasi swasta asing masih belum meningkat, padahal sebagian besar proyek kemitraan mengandalkan pinjaman asing. Kedua, sumber dana pembangunan infrastruktur dari perbankan sangat terbatas karena ketidakcocokan antara jangka waktu penyelesaian dan pengembalian proyek dengan jangka waktu pinjaman yang diberikan. Pada umumnya proyek infrastruktur memerlukan waktu antara 15-30 tahun untuk melunasi investasinya, sedangkan perbankan umumnya tidak tertarik mendanai proyek-proyek berjangka panjang.(Kementrian Keuangan, 2014)

Kondisi tersebut tentu tidak hanya dialami oleh Indonesia, akan tetapi hampir semua negara dewasa ini tengah menghadapi tantangan dalam mencari pendanaan di tengah krisis global. Upaya untuk mengakses sumber-sumber

pendanaan untuk membiayai kebutuhan infrastruktur akan lebih efisien dan memiliki nilai tambah apabila ada kerjasama regional yang intensif.

Setidaknya terdapat tiga keuntungan dari adanya dari kerjasama regional, yakni: (i) dana yang terkumpul akan lebih besar,(ii) proyek tertentu yang melintasi batas-batas nasional memerlukan kerjasama dan koordinasi antar satu atau lebih negara; (iii) kegagalan dalam mengatasi kemacetan infrastruktur lintas batas yang akan menghambat pengembangan dan intensifikasi jaringan pasokan regional dapat memicu perdagangan dan pertumbuhan pendapatan di wilayah.(Kementrian Keuangan, 2014)

Munculnya *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)* sebagai bank multilateral baru yang berfokus dalam pembangunan infrastruktur kawasan Asia tentu menjadi angin segar bagi Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia pada tanggal 25 November 2014, dengan diwakili oleh menteri keuangan melakukan penandatanganan MoU pendirian AIIB di Jakarta.

Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam AIIB bukanlah keputusan yang tiba-tiba, sebab tawaran untuk berpartisipasi dengan AIIB sudah dilakukan oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping kepada Presiden Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yodoyono. Inisiatif pembentukan AIIB pun telah lama dipaparkan oleh pemerintah Tiongkok pada berbagai forum seperti ASEAN, APEC dan beberapa forum bilateral. Pada setiap forum pertemuan, inisiatif tersebut mendapat sambutan positif karena isu pembangunan

infrastruktur merupakan salah satu isu penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan adanya *financing gap* dalam pembiayaan infrastruktur.(Anggraeni, 2015)

Indonesiasendiri yang telah menanamkan kontribusi sebesar US\$672,1 juta yang akan dibayar selama lima tahun,menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ke-8 di AIIB. Dengan Kontribusi tersebut, Indonesia memiliki 3,36 persen dari seluruh modal AIIB.(VOA Indonesia, 2015)